CASCADING BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

VISI KOTA

Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera

MISI KE-4

Menghadirkan Pemerintahan Yang Baik Bersih dan Inovatif

TUJUAN

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Tranparan dan Akuntabel

Indikator Tujuan

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Sasaran Es.II

Sasaran	Indikator
Sasaran 1: Mengelola keuangan sesual dengan ketentuan aturan yang berlaku	1. Persentase Capaian realisasi Belanja (Quality of Budget planning)
Sasaran 2: Mengelola keuangan sesual dengan ketentuan aturan yang berlaku	1.Maksimal Defisit APBD 2. Persentase Capaian Realisasi Anggaran 3. Persentase Capaian realisasi belanja modal (Quality of spendding) Bidang Pendidikan 4.Persentase Capaian realisasi belanja modal (Quality of spendding) Bidang Kesehatan
Sasaran 3: Mengelola Pendapatan Daerah	1.Persentase Capaian Realisasi Pendapatan (Fiscal Space)
Sasaran 4: Mengelola BMD sesual dengan aturan yang berlaku	1. Persentase OPD dengan laporan BMD yang Akurat dan Akuntabel

Sasaran Es.III

Sasaran	Indikator
Sasaran 1: Penetapan APBD tepat waktu	Penetapan APBD tidak melewati tahun anggaran berkenaan
Sasaran 2: Penyusunan APBD sesuai aturan	Penyusunan APBD sesuai dengan regulasi
Sasaran 1 (ind.1): Meningkatnya kualitas penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase kesesuaian penyerapan anggaran sesuai aturan
Sasaran 2 (ind.2): Penyajian LKPD tepat waktu	Tersedianya laporan keuangan OPD
Sasaran 3 (ind.3): Pengelolaan Kas Daerah sesuai aturan	1. Menigkatnya sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan 2. Penyampaian laporan penyerapan anggaran tepat waktu
Sasaran 4 (ind.4): Meningkatnya kepatuhan terhadap tindak lanjut hasil TPTGR	persentase penyelesaian terhadap temuan LHP Keuangan oleh Pemeriksaan BPK
Sasaran 1: Meningkatkan PAD dari PBB-P2 dan BPHTB	Tercapainya Target PBB-P2 dan BPHTB
Sasaran 1: Meningkatkan PAD	Tercapainya Target PAD
Sasaran 1: Penyajian LKPD tepat waktu	Tersedianya laporan BMD OPD
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas penatausahaan BMD	Persentase kesesuaian pencatatan dan pelaporan BMD sesuai aturan
Sasaran 3: Pengelolaan BMD sesuai aturan	Penyampaian data laporan BMD perpriode tepat waktu
Sasaran 4: Tindaklanjut LHP Pemeriksaan BMD	Persentase penyelesaian terhadap temuan LHP BMD oleh Pemeriksaan BPK

Sasaran Es.IV

Sasaran	Indikator
Sasaran 1: Menyusun jadwal pembahasan anggaran	Terlaksananya kegiatan sesuai jadwal
Sasaran 2: Tersusunnya Anggaran Belanja Tidak Langsung pada APBD	1. Verifikasi rekomendasi penganggaran hibah bansos 2. Verifikasi usulan 2. RKA BTL 3. Verifikasi dan penghitungan besaran ADD, DBHP, DBHR
Sasaran 3: Tersedianya Apikasi penyusunan anggaran	Aplikasi yang dapat dipergunakan dalam penyusunan anggaran
Sasaran 4: Tersusunnya Anggaran Belanja Langsung pada APBD	1 Tersusunnya regulasi penyusunan APBD 2: Verifikasi usulan Belanja Langsung OPD 3. Pedoman penyusunan APBD dan SSH
Sasaran 1: Peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan perbendaharaan	1. Ketepatan waktu penerbitan SP2D 2. Pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD 3. Terlaksanannya rekonsiliasi kas daerah 4.Ketepatan waktu penyampaian laporan dana transfer 5.Terlaksanannya manajemen dan penatausahaan kas daerah
Sasaran 2: Terlaksananya Pembinaan pengelolaan keuangan daerah	1. Tersedianya peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah 2. Sosialisasi aturan pengelolaan keuangan daerah 3. Peningkatan penyelesaian tindak lanjut LHP Pemeriksaan BPK
Sasaran 3: Penyusunan laporan keuangan daerah	1.Penyusunan laporan keuangan OPD 2.Penyajian dan pengungkapan dalam pos-pos laporan keuangan 3. Terlaksanannya rekonsiliasi LRA OPD
Sasaran 1: Optimalisasi, monitoring, penagihan dan Validasi piutang PBB-P2	1.Tercapainya Target PBB-P2 2.Terhapusnya piutang PBB-P2 yang kadaluarsa
Sasaran 2: Pelayanan dan Penyusunan laporan realisasi PBB dan BPHTB secara akurat	1. Tersusunya laporan realisasi PBB-P2 dan BPHTB 2. Terverifikasinya berkas di bagian pelayanan tepat waktu
Sasaran 3: Optimalisasi verifikasi dan penilaian BPHTB	1.Jumlah berkas BPHTB yang diverifikasi 2.Realisasi BPHTB
Sasaran 4: Optimalisasi Pendataan, Penilaian dan Penetepan PBB-P2	1. Jumlah SPPT 2. Nilai PBB-P2
Sasaran 1: Optimalisasi, monitoring dan penagihan PAD	1.Tercapainya Target PAD
Sasaran 2: Optimalisasi Pendataan dan Penetapan PAD	1. Jumlah objek pajak yang didata dan ditetapkan 2 Tersedianya Aplikasi Pendapatan Daerah
Sasaran 1: Penyusunan dan Verifikasi RKBMD dan RKPBMD	Daftar kebutuhan RKBMD dan RKPBMD
Sasaran 2: Penyusunan standerisasi harga berdasarkan jenis dan tipe barang	Data harga barang
Sasaran 3: Pentepan status pengguna BMD	Barang yang ditetapkan status penggunanya
Sasaran 4: Kerjasama Pemanfaatan Aset Pihak Ketiga	Aset pihak ketiga yang dimanfaatkan Pemerintah Kota
Sasaran 5: Pelaksanaan Pemeliharaan BMD dan Pelelangan BMD	1. Barang Milik Daerah yang dipeliharaan BMD 2. BMD yang akan dilelang
Sasaran 6: Pengamanan fisik BMD	Penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya
Sasaran 7: Pelaksanaan Penatausahaan BMD	Penyampaian laporan BMD tepat waktu

Program

Program	Indikator
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	- Jumlah dokumen ssh dan juknis penyusunan RKA - Jumlah aplikasi yang dikelola - Jumlah dokumen perubahan APBD - Jumlah Dokumen APBD - Jumlah Peserta Sosialisasi
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	- Jumlah laporan TAPD
Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	- Jumlah Peserta Sosialisasi - Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah -Laporan tindak lanjut TPKD - Jumlah laporan penatausahaan pengelolaan adm.keuangan OPD dan daerah - Jumlah laporan dana transfer - Jumlah Peserta Sosialisasi
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	- Julah laporan evaluasi
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	- Jumlah sistem aplikasi yang dikelola - Jumlah penerimaan PBB - Jumlah dokumen data objek dan subjek PBB-P2 dan DHKP - Jumlah data objek pajak dan subjek PBB-P2yang dientri dan jumlah objek dan subjek BPHTB yang diverifikasi - Jumlah peserta sosialisasi
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	- Jumlah laporan potensi pajak dan retribusi - Jumlah sistem aplikasi yang dikelola - Jumlah peserta sosialisasi - Jumlah dokumen data base wajib pajak dan retribusi - Jumlah penerimaan PAD - Jumlah laporan karcis pajak yang terdistribusi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Jumlah rumah dinas yang direhab - Jumlah kendaraan dinas / operasional yang direhab - Jumlah sewa tanah dan bangunan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	- Jumlah dokumen BMD Kota Sawahlunto - Jumlah aset yang diregistrasi - Jumlah PAD dari hasil pelelangan
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	- Jumlah laporan evaluasi BMD

Keglatan

Kegiatan	Program
1.Penyusunan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan APBD Penyusunan RKA dan standar satuan harga 2.Penyusunan APBD 3.Penyusunan Perubahan APBD 4. Pengelolaan Sistem Informasi dan keuangan daerah 5. Sosisalisasi peraturan penganggaran daerah dan fasilitasi penyerahan DPA	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
1. Bimtek SAKD dan SPJ OPD 2. Penyusunan Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah 3.Verifikasi Adm keuangan daerah 4. Pelaksanaan Tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi 5.Penatausahaan pengelolaan adm.keuangan 6. Pengelolaan dana transfer dan manajemen kas daerah 7. Pelatihan adm.keuangan daerah	Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Evaluasi Laporan Keuangan OPD	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota
1. Pengelolaan Sistem Aplikasi PBB online 2.Intensifikasi Pemungutan PBB serta Pembekalan Kolektor PBB-P2 3.Penyusunan dokumen data base wajib pajak dan atau retribusi daerah 4.Verifikasi dan pengentrian data objek dan subjek PBB-P2 dan BPHTB 5. Sosialisasi PBB-P2 dan BPHTB	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 2 Pengelolaan Sistem Aplikasi Pendapatan 3. Sosialisasi pajak dan/atau retribusi daerah 4. Penyusunan database wajib pajak dan retribusi daerah 5. PengelolaanPAD 6. Pengelolaan Karcis Pajak dan Retribusi Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Pemeliharaan sedang/ berat rumah dinas 2. Rehabilitasi Sedang/berat kendaraan dinas 3. Pembayaran kewajiban sewa tanah dan bangunan yang dugunakan oleh Pemko Sawahlunto	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Penyusunan Dokumen Barang Milk Daerah (BMD) Kota Sawahlunto 2. Peningkatan manajemen aset/ Barang Milk Daerah 3.Pelelangan Barang Milk Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.Monitoring dan Evaluasi BMD	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

Sawahlunto, September 2018

Kepala Badan BPKAD Kota Sawahlunto

BUDI UTAMA, S.Sos.MSi

NIP. 196208101973081001

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO — BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH